

Komnas HAM Sebut Putri Akui Ada Peristiwa Lukai Martabatnya

JAKARTA (IM) - Komnas HAM kembali memeriksa istri Irfan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Pemeriksaan itu dilakukan tim Komnas HAM bersama Komnas Perempuan.

"PC, kami sudah dua kali meminta keterangan dan dibantu Komnas Perempuan," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Rabu (31/8).

Beka menjelaskan, dari pemeriksaan kedua, Putri mengakui ada peristiwa yang melukai harkat dan martabatnya. Dia menyebut hal itu akan dibuktikan pada saat di pengadilan. "Bu Putri menyampaikan memang ada kejadian yang kemudian memang merendahkan harkat dan martabat PC. Nantinya ini akan dibuktikan, saya kira penting untuk dibuktikan pengadilan bagaimana peristiwa tersebut, apakah menjadi motif atau latar belakang kita lihat pembuktian di pengadilan," kata Beka.

Di luar hal tersebut, Beka menyoro soal perintangan penyidikan (obstruction of justice) yang terjadi pada awal penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) ini.

"Yang terpenting adalah peristiwa pembunuhan itu sendiri, bahwa itu sudah terjadi, dan penanganannya kasus pembunuhan ini, itu meli-

batkan banyak sekali aparat kepolisian dan kemudian juga menghalang-halangi, kemudian rasa keadilan itu, itu yang paling penting saya kira," katanya.

Sebelumnya, tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah melakukan pemeriksaan pertama terhadap Putri, Sabtu (20/8). Kemudian, keduanya sepakat kembali memeriksa Putri lantaran ada yang perlu didalami kembali.

"Ya mereka (tim Komnas HAM dan Komnas Perempuan) sudah berhasil mendalami, tapi belum sepenuhnya. Jadi tetap akan coba lagi nanti dengan tim Komnas HAM yang perempuan untuk kembali meng-crosscheck keterangan-keterangan dari PC," kata Taufan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

Diketahui, pada Jumat (19/8) Polri menetapkan istri Irfan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC), sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J.

Total telah ada lima tersangka dalam kasus ini. Selain Putri, keempat tersangka lainnya adalah Irfan Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripta Ricky Rizal, dan Kuat Ma'rif. Putri dianggap terlibat dalam terkait tewasnya Brigadir J. Putri berperan mengikuti skenario awal yang telah dirancang oleh Ferdy Sambo. ● osm

Polhukam

FOTO: ANT



Mahfud Md: Pengacara Brigadir J Tak Harus Diundang Saat Rekonstruksi

Mahfud Md menilai rekonstruksi sudah benar secara hukum karena memang ditujukan untuk membuktikan soal pembunuhan berencana. Menurutnya, soal bagaimana cara membunuh hingga motif pembunuhan tidak penting ditunjukkan dalam proses rekonstruksi.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md ikut menanggapi protesnya pengacara Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang tidak diizinkan ikut dalam proses rekonstruksi kemarin.

Mahfud mengatakan polisi memang tidak wajib mengundang pengacara korban.

"Oleh sebab itu, ketika rekonstruksi dilakukan ya mereka (pengacara Yosua, red) memang tidak harus diundang. Meskipun tidak harus dilarang. Itu sama saja dengan masyarakat biasa," kata Mahfud dalam siaran daring YouTube

Lembaga Survei Indonesia, Rabu (31/8).

Mahfud menjelaskan, dalam perkara pidana, adalah para tersangka yang wajib didampingi pengacara. Sementara itu, untuk korban diwakili pengacara negara, yakni jaksa.

"Sebenarnya kalau di dalam hukum itu yang berhak mendapat pengacara itu sebenarnya kan terpidana, bukan korban ya. Karena kalau korban tidak maju ke pengadilan, kalau yang boleh punya pengacara itu yang tersangka seperti Bharada (Eliezer, red), Sambo itu. Kalau Yosua sebenarnya kan tidak harus tetapi itu diperbolehkan sebagai pelapor,"

tuturnya.

Karena itu, kata Mahfud, saat rekonstruksi Selasa lalu, hanya pengacara dari para tersangka yang diundang. Sedangkan untuk Yosua sudah diwakili oleh pengacara negara atau jaksa.

"Tetapi kalau dalam hukum pidana yang punya pengacara itu yang merugikan orang lain agar di pengadilan hukumannya ringan, kalau bisa bebas. Kalau sudah korban tidak perlu, yang menjadi pengacara korban itu adalah negara yaitu jaksa, itu pengacara negara yang menuntut kepentingan korban mewakili negara. Itu ya jaksa dan jaksa yang sudah ikut hadir. Saya ingin agar kita paham masalah ini tidak selalu mencari sudut salahnya," papar Mahfud.

Lebih jauh Mahfud mengatakan, jalannya rekonstruksi dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang diikuti Ferdy Sambo secara hukum sudah benar.

Hal tersebut dilontarkan menanggapi kontroversi yang mengemuka soal jalannya proses rekonstruksi pem-

bunuhan Brigadir J, ketika publik mempertanyakan absennya sejumlah adegan dalam rekonstruksi tersebut.

"Kalau menurut saya, secara hukum itu benar karena rekonstruksi itu hanya pembuktian, ingin membuktikan bagaimana ia membunuh," kata Mahfud.

Mahfud menilai rekonstruksi sudah benar secara hukum karena memang ditujukan untuk membuktikan soal pembunuhan berencana. Menurutnya, soal bagaimana cara membunuh hingga motif pembunuhan tidak penting ditunjukkan dalam proses rekonstruksi.

"Tidak penting ditunjukkan dalam proses rekonstruksi sehingga terlalu jauh kalau orang 'oh, tidak dijelaskan bagaimana cara melecehkan, bagaimana waktu membocong', itu nggak penting karena rekonstruksi itu, kalau motif nanti bisa dirangkai dari keterangan lisan. Itu tidak penting karena bukti pembunuhannya sudah diakui dan sudah direkonstruksi," katanya.

RDP PERSIAPAN PEMILU 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (ketiga kiri), Wamendagri John Wempi Wetipo (kedua kiri), Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri), Ketua DKPP Muhammad (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8). Rapat tersebut membahas mengenai persiapan Pemilu 2024 dan persiapan Pemilu di Papua.



FOTO: ANT

SIDANG DAKWAAN KASUS KORUPSI MINYAK GORENG

Mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana menjalani sidang dakwaan di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (31/8). Indra Sari Wisnu Wardhana didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp6,047 triliun dan perekonomian negara sejumlah Rp12,312 triliun.

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 5 Agustus 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA sebagaimana termaktub dalam akta Addendum REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA
Jakarta, 1 September 2022
Manajer Investasi
REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Survei Poltracking, PDIP dan Ganjar Teratas

JAKARTA (IM) - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis elektabilitas partai politik (papol) jelang Pemilu 2024. Elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) paling tinggi, sementara itu terjadi persaingan ketat di papan tengah.

Sedangkan Ganjar Pranowo menjadi capres dengan elektabilitas teratas

Survei Poltracking digelar

secara nasional pada 1-7 Agustus 2022 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total 1.220 responden dilibatkan dalam survei yang memiliki margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Klaster survei ini diklaim menjangkau 34 provinsi selendras secara proporsional berdasarkan data jumlah popu-

lasi pemilih terakhir. Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.

Jika pemilu digelar saat survei dilaksanakan, maka PDIP meraih 20,4%, diikuti Partai Gerindra 10,5% dan

Partai Golkar 9,5%. "Hal lain yang perlu dicatat terkait elektabilitas partai politik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah sebesar 4%," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam keterangan tertulis,

Rabu (31/8).

"Survei ini menunjukkan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold masih berpotensi meraih suara publik. Selain karena masih ada publik 14,3% yang tidak tahu, tidak jawab dan publik 4,7% merahasiakan jawaban, dinamika elektoral dan isu politik saat ini cukup signifikan pada 2024 sangat berpengaruh pada naik-turunnya suara partai," sambungnya.

Elektabilitas papol: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 20,4%, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 10,5%, Partai Golongan Karya (Golkar) 9,5%, Partai Demokrat (PD) 8,6%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8,0%, Partai NasDem 6,7%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5,2%, Partai Amanat Nasional (PAN) 4,1%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,1%.

Lalu Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1,9%, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 1,1%, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,7%, Partai Beringin Karya (Berkarya) 0,6%, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 0,3%, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 0,2%, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 0,1%, tidak mau menjawab/merahasiakan jawaban 4,7% serta tidak tahu/tidak jawab 14,3%.

Terlepas dari capres dan cawapres jelang Pilpres 2024, hasilnya, Pranowo menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi dan Ridwan Kamil terkuat di posisi cawapres. "Survei meremak 10 nama teratas capres Indonesia Pilpres 2024. Dari 10 nama teratas, ada tiga kandidat terkuat dengan elektabilitas dua digit, yaitu Ganjar Pranowo (26,6%), Prabowo Subianto (19,7%) dan Anies Baswedan (17,7%)," kata Hanta.

Sementara capres dengan elektabilitas di bawah 5% yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (4,7%), Ridwan Kamil (3,9%), Erick Thohir (2,8%), Sandiaga Salahudin Uno (2,4%), Puan Maharani (2,2%), Khofifah Indar Parawansa (2,2%) dan Airlangga Hartarto (1,7%). ● osm

PT DEWATA FREIGHT INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK		LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Kirana Two Office Tower 12nd floor - suite A-B Jl. Boulevard Timur No. 88 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Telp : +622129688899 Fax : +622129677799					
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	
30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2021 (Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
		30 Juni 2022		30 Juni 2021	
		2022		2021	
				30 Juni	
				2022	
				2021	
ASET		PENDAPATAN		ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
ASET LANCAR		BEBAN POKOK PENDAPATAN		Penerimaan dari pelanggan	
Kas dan setara kas		LABA KOTOR		Pendapatan bunga	
Piutang usaha - pihak ketiga		BEBAN USAHA		Pembayaran kepada pemasok	
Piutang lain-lain - pihak ketiga		Penghasilan Umum dan administrasi		Pembayaran beban keuangan	
Persediaan		LABA USAHA		Pembayaran kepada karyawan	
Beban dibayar di muka		PENGHASILAN (BEBAN) LAIN/LAIN		Pembayaran kepada pemerintah	
Utang muka		Beban bunga		Kegiatan operasional lainnya	
Pajak dibayar di muka		Denda pajak		Kas bersih yang (digunakan)/diperoleh dari aktivitas operasi	
Aset lancar		Beban administrasi bank		ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Total Aset Lancar		Penghasilan keuangan		Perolehan aset tetap	
ASET TETAP - NETO		Labai (rugi) selisih kurs		Kas bersih yang (digunakan) dari aktivitas investasi	
Aset tetap - neto		LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Aset takberwujud		Lain/lain (bersih)		Pembayaran utang bank jangka panjang	
Beban pajak ditangguhkan		Beban Lain/lain (neto)		Setoran modal	
Aset lain-lain		BEBAN PAJAK PENGHASILAN		Pembayaran utang jangka pendek	
Total Aset Tidak Lancar		Keti Tanggahan		Pembayaran utang sewa pembiayaan	
TOTAL ASET		LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		Pembayaran utang pembiayaan konsumen	
LIABILITAS DAN EKUITAS		Pembelian kembali saham		Penerimaan utang lain-lain	
LIABILITAS JANGKA PENDEK		Pembelian kembali saham		Kas bersih yang diperoleh/(digunakan) dari aktivitas investasi	
Utang bank jangka pendek		Pembelian kembali saham		KEMAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	
Utang usaha - pihak ketiga		Pembelian kembali saham		Kas dan setara kas awal tahun	
Utang hutang pembiayaan		Pembelian kembali saham		KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	
Utang hutang konsumen		Pembelian kembali saham			
Utang lain-lain - pihak ketiga		Pembelian kembali saham			
Utang pajak		Pembelian kembali saham			
Beban masih harus dibayar		Pembelian kembali saham			
Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		Pembelian kembali saham			
Utang bank		Pembelian kembali saham			
Utang sewa pembiayaan		Pembelian kembali saham			
Utang pembiayaan konsumen		Pembelian kembali saham			
Liabilitas imbalan kerja karyawan		Pembelian kembali saham			
Total Liabilitas Jangka Pendek		Pembelian kembali saham			
LIABILITAS JANGKA PANJANG		Pembelian kembali saham			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		Pembelian kembali saham			
Utang bank		Pembelian kembali saham			
Utang sewa pembiayaan		Pembelian kembali saham			
Utang hutang konsumen		Pembelian kembali saham			
Utang lain-lain - pihak ketiga		Pembelian kembali saham			
Utang pajak		Pembelian kembali saham			
Beban masih harus dibayar		Pembelian kembali saham			
Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		Pembelian kembali saham			
Total Liabilitas Jangka Panjang		Pembelian kembali saham			
TOTAL LIABILITAS		Pembelian kembali saham			
EKUITAS		Pembelian kembali saham			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan		Pembelian kembali saham			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021		Pembelian kembali saham			
Modal dasar		Pembelian kembali saham			
3.280.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021		Pembelian kembali saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh		Pembelian kembali saham			
1.146.170.959 saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021		Pembelian kembali saham			
Salah satu transaksi dengan kepentingan nonpengendali		Pembelian kembali saham			
Saldo laba		Pembelian kembali saham			
Dicaanakan		Pembelian kembali saham			
Balok dicadangkan		Pembelian kembali saham			
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan		Pembelian kembali saham			
Kepentingan nonpengendali		Pembelian kembali saham			
TOTAL EKUITAS		Pembelian kembali saham			
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		Pembelian kembali saham			
		Pembelian kembali saham			

Jakarta, 01 September 2022

PT DEWATA FREIGHT INTERNATIONAL Tbk

Direksi